

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023


PII INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 3 Maret 2023



MASJUDIN SUDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650329 199303 1 007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	1
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.	2
E. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	2
BAB II	5
PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5
B. Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	5
C. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6
D. Keselarasan Kinerja	6
E. Sasaran dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6
F. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7
G. Cascading Kinerja	8
H. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
BAB IV	24
PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Strategi Peningkatan Kinerja	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Lembaga/Instansi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut : ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.”***

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri sehingga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif dalam memadukan gerak dan langkahnya dapat terjalin secara harmonis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengelolaan keuangan dan aset dapat mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang akuntabel.

D. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus terlebih dahulu kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah :

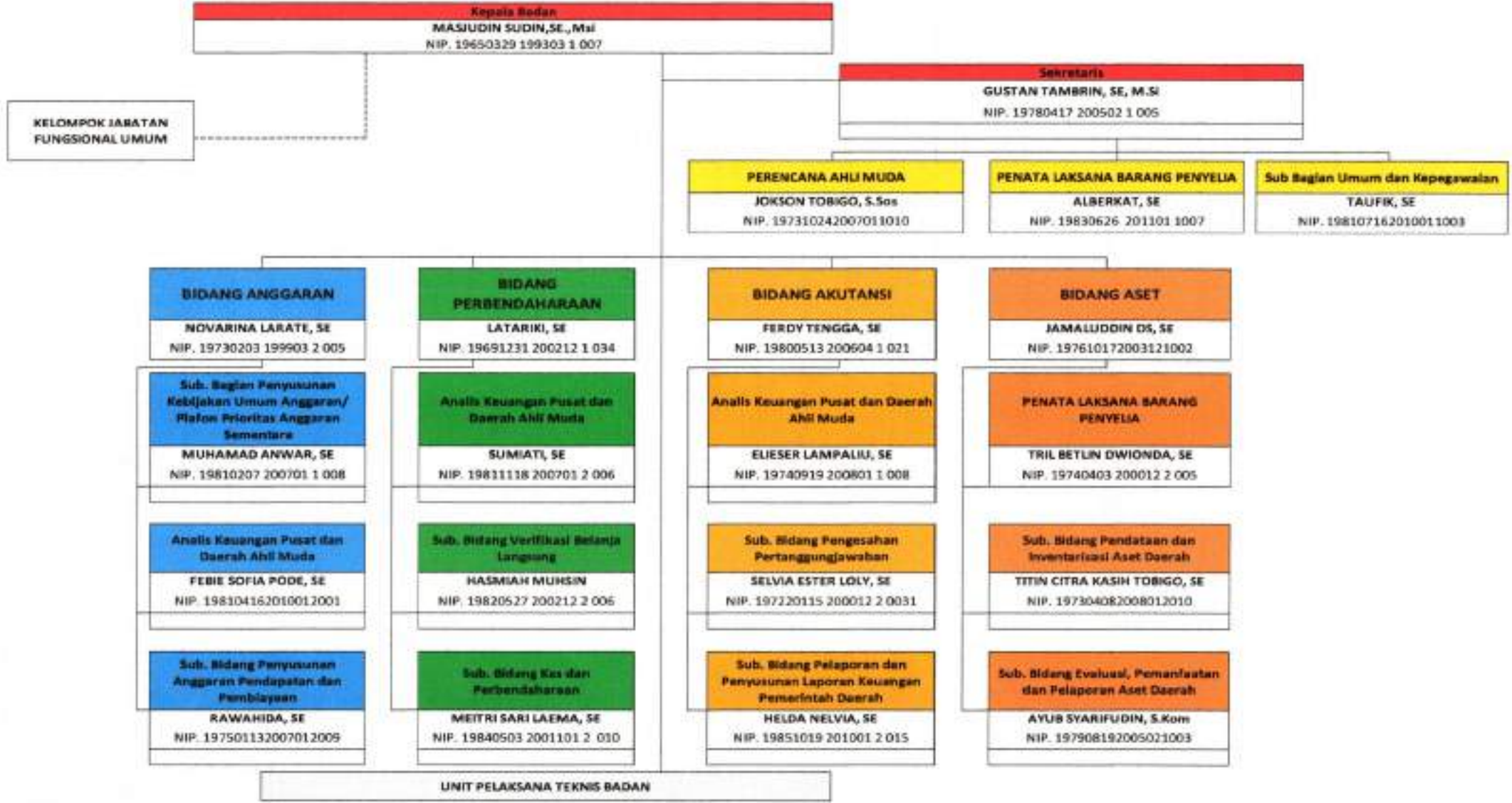
1. Pengiriman data untuk penyusunan APBD dari masing-masing unit kerja kurang tepat waktu.
2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang terlalu cepat di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Adanya tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel bagi lembaga pemerintah.

4. Adanya tuntutan pemerintah mendapatkan data secara cepat dan akurat.
5. Adanya tuntutan masyarakat yang mengarah kepada pemberdayaan daerah dalam upaya menjadikan daerah mampu dan mandiri dalam pembiayaan daerah.

E. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Perekonomian dan Keuangan terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Empat Bidang dan satu Sekretariat, dimana tiap-tiap bidang membawahi tiga Kepala Seksi dan Sekretariat membawahi Tiga Kepala Sub Bagian dan mempunyai staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan tata cara serta prosedur pengelolaan keuangan dan asset, taat prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komitmen untuk mewujudkan penataan pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel dan transparan yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
- c. Peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset serta pelaporannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

B. Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi *"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sehat,cerdas,dan sejahterah"*.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta

program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

C. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas :

Dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas **“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten”**

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali utara tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan Kinerja Misi – 5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif
Sasaran	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

E. Sasaran dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-

batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

F. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Optimasi hasil pemerintasan oleh BPK	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan-Transfer Expenditures}}{\text{Jumlah Belanja}} \times 100\%$	Laporan keuangan dan pengelolaan aset sesuai standar teknis	- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

G. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka kabupaten Morowali utara menyusun cascading kinerja daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah

POHON KINERJA ATAU CASCADING BPKAD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera							
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
					Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Program pengelolaan keuangan daerah	Presentasi Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah Dokumen RKA yang Tersedia	<p>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</p>
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<p>Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</p>
					Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala</p>

							Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		-			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		-	Program Pengelolaan Barang milik daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terciptanya Manajemen Asset yang Handal	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

H. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Rencana Strategis. Susunan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	100%

Program Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Rp.54.665.258.530,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp.216.255.237.943,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Rp.1.060.904.700,00

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran sebesar **Rp.229.711.476.440,00**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selaku SKPD Penunjang yang berwenang dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kabupaten Morowali Utara telah berperan bagi kemajuan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Adapun Kinerja yang telah ditempuh atas pelayanan Kinerja antara lain dapat dilihat dari beberapa Aspek yaitu :

1. Aspek Belanja

Adanya perubahan penyusunan anggaran belanja daerah yang mengacu pada Anggaran Berbasis Kinerja dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, maka dalam pelaksanaannya BPKAD Kabupaten Morowali Utara harus menyiapkan sumber daya manusia dan perangkat lunak yang diperlukan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk merencanakan anggaran belanja secara optimal.

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	100%	75 %	75 %

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis seperti table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- b. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel. Dengan indokator kinerja sasaran realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:**

Indikator Kinerja Sasaran Rasio Belanja Urusan Pemerintahan

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 75 % dari Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum laporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi target yang ditetapkan adalah 100%

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021– 2022.**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan tidak adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	78%	75%

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten morowali utara dapat dilihat dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi sulawesi tengah sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Morowali utara Tahun 2022 Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

- a. Penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali utara atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah
- b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :
 1. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten morowali utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
Peningkatan koordinasi antar instansi terkait di lingkup pemerintah daerah kabupaten morowali utara dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten morowali utara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan.
 2. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
 3. Optimalisasi tatakelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten morowali utara telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen

perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan. Upaya pencapaian target WTP tahun 2021 ini didukung oleh 2 (dua) program prioritas/program operasional dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal 100% ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten morowali utara telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah Laporan yang Disusun dan telah diterbitkan Laporan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 PD telah tepat dalam menentukan kode rekening pada RKA PD;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 PD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (RKA PD, RAPBD, APBD dan P-APBD);
- 3) Seluruh Perangkat Daerah telah tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan;
- 4) Perangkat Daerah tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan, dan Perangkat Daerah telah melakukan penyerapan anggaran; dan
- 5) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 OPD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD).

3. Program Pengelolaan barang milik daerah Daerah.

Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Presentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD target;
- 2) Seluruh proses pemindahtanganan BMD telah dilaksanakan;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 OPD telah tepat waktu dalam penyampaian laporan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	100%	75%	75%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum dengan Rumus IKU adalah **Urusan Pemerintah – Transfer x 100%**
Jumlah Belanja

$$\frac{1.037.280.098.010,40}{1.394.092.807.924} \times 100\%$$

realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target RENSTRA adalah 100% dan pada realisasi Tahun 2022 Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2022 adalah 75%,

2) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan melihat Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

3) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat pendukung di Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten morowali utara, sumber daya

pendukung meliputi 2(dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia

a. Keuangan

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan beserta realisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten morowali utara sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp. 16.964.335.688,00	Rp. 6.794.606.913,00	40,05%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.671.404.689,00	Rp. 7.239.091.921,00	83,48%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.348.334.371,00	Rp. 2.236.027.760,00	95,22%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.150.000.000,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 198.152.041.600,00	Rp. 174.940.357.116,00	88,29%
Belanja bagi hasil	Rp. 425.360.092,00	-	-

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten morowali utara pada tahun 2022 sebanyak 45 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 40 orang dari jumlah yang terbatas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah kabupaten morowali utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru.

4) Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

- Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
 - ✓ Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - ✓ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor;
 - ✓ Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan;
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Mebel;
 - ✓ pengadaan kendaraan operasional/lapangan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - ✓ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - ✓ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - ✓ Koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
 - ✓ Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - ✓ Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- c. Program Pengelolaan Barang milik daerah
- Kegiatan Pengelolaan Barang milik daerah
 - ✓ Penatausahaan barang milik daerah;
 - ✓ Inventarisasi barang milik daerah.

5) Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah .

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar

Rp. 229.711.476.440,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara. Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2022 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan terdiri dari :

Tabel. 11

**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
UNTUK BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Program penunjang urusan pemerintah daerah	20.499.459.140	9.890.404.826	48,25%
		Program pengelolaan keuangan daerah	206.176.666.250	76.610.754.749	37,16%

		Program pengelolaan barang milik daerah	3.035.351.050	2.682.876.130	88.39%
--	--	---	---------------	---------------	--------

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{EFISIENSI} = \text{CAPAIAN KINERJA} - \text{SERAPAN ANGGARAN}$$

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN;
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF;
3. Dikatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 3(tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh) sub kegiatan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. pencapaian kerjanya adalah Belum efektif

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2022 ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa depan. Dalam upaya mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai, Secara umum, Terlihat bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 adalah belum efektif terlihat Dari Target Renstra pada tahun 2022 adalah 100% namun pada realisasi hanya mencapai 75%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit dengan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pelaksanaan pelatihan dan diklat;
- b. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan asset yang lebih tertib.

Terima Kasih,
Kolonodale, Maret 2023

KEPALA BADAN



MASJUDIN SUDIN, SE., M.Si.
NIP.19650329 199303 1 007